Berita Dewan Pers

Etika

DEWANPERS

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Foto: Etika/Chelsia.

AUDIENSI – Dalam rangka menghadiri pertemuan bilateral dengan Dewan Pers Thailand, delegasi Dewan Pers Indonesia (dari kiri ke kanan) Jimmy Silalahi, Nezar Patria (ketua delegasi), Ratna Komala dan Imam Wahyudi beraudiensi kepada Dubes RI untuk Thailand, Ahmad Rusdi (tengah) di Bangkok. Kamis (17/8/2017).

Ciri - Ciri Berita Hoax

Verifikasi Media Penting

Korran Tempo dan Kompas Tak Langgar Kode Etik

RAPAT KOORDINASI – Rapat Koordinasi antara Dewan Pers dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilangsungkan di Jakarta, Rabu (23/8/2017). Foto: Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar bersama Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. Ir. Hamli, ME (tengah).

(Foto: Etika/Chelsia)

Dewan Pers Beberkan Ciri-Ciri Berita Hoax

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, membeberkan beberapa ciri berita bohong yang biasa disebut *hoax,* saat tampil sebagai pemateri dalam kegiatan Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat di Ternate, Maluku Utara, pertengahan Agustus lalu.

Kegiatan Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat tersebut digelar oleh BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara.

Stanley, demikian Yosep Adi Prasetyo disapa, menyebut ciri pertama *hoax* adalah begitu disebar, berita itu dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan dan kebencian pada masyarakat yang terpapar. "Masyarakat yang terpapar *hoax* biasanya akan terpancing perdebatan. Jika sudah berdebat, mereka akan saling benci dan bermusuhan," ujarnya.

Ciri kedua *hoax*, lanjut Stanley, adalah ketidakjelasan sumber beritanya. "Jika diperhatikan, *hoax* di media sosial biasanya berasal dari pemberitaan yang tidak atau sulit terverifikasi," tambah Stanley. Ciri ketiga, menurut dia, isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.

Kemudian ciri keempat, kata Stanley, sering bermuatan fanatisme atas nama ideologi. "Judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghakiman bahkan penghukuman tetapi menyembunyikan fakta dan data," ujarnya seraya menambahkan, "Biasanya juga mencatut tokoh tertentu. Penyebarnya juga meminta apa yang dibagikannya agar dibagikan kembali,"

Dari ciri-ciri *hoax* yang disebutkannya, Stanley meminta masyarakat untuk selalu waspada dan ikut mencegah peredarannya, karena semakin hari semakin mengkhawatirkan. Masyarakat juga diminta berlaku cerdas dalam membedakan konten dalam media sosial dan pers.

"Yang ada di media sosial itu informasi, belum terverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu jika ada informasi di medsos, baca dengan teliti, klarifikasi kebenarannya, verifikasi dengan cara membandingkan berita yang sama dari sumber berbeda, jangan langsung diterima atau disebar ulang," pesan Stanley.

Sebelumnya, ketika tampil sebagai pemateri di kegiatan Visit Media BNPT dan FKPT Aceh ke redaksi media massa pers, Stanley mengatakan dalam konteks Aceh saran penggunaan diksi keras dikurangi dapat dibenarkan. Catatan sejarah masa lalu disebutnya sebagai alasan pembenaran. "Aceh memiliki sejarah masa lalu yang kelam, salah satunya GAM yang sempat dituding sebagai terorisme. Apa yang disarankan FKPT Aceh ada benarnya," katanya, Rabu (9/8/2017).

Stanley menilai apa yang disosialisasikan FKPT Aceh sudah tertuang dalam Pedoman Peliputan Terorisme, aturan bersama terkait pemberitaan seputar terorisme yang merupakan hasil kerjasama BNPT dan Dewan Pers.

"Pers diminta tidak melakukan glorifikasi dalam pemberitaan, salah satunya pemilihan diksi yang lembut dan tidak menyudutkan pihak-pihak tertentu," jelas Stanley.

Lebih jauh Stanley mengatakan, menjelang akhir tahun 2016 berita *hoax* semakin banyak tersebar di tengah masyarakat terutama melalui media sosial. Saat ini, kata dia, banyak beroperasi media-media tidak resmi yang menyebarkan berita-berita tidak valid.Celakanya berita-berita tersebut tidak jarang menjadi konsumsi masyarakat umum.

Ia memaparkan, sekarang telah beredar 47 ribu media di seluruh Indonesia dengan 2.500 diantaranya media cetak dan 43.300 lainnya media online. Namun, yang terverifikasi oleh Dewan Pers hanya 500 media cetak dan

168 media online. Sementara sisanya masih tidak diketahui validitasnya

"Bahkan tak jarang kasus pemerasan dan penipuan terjadi dengan membawa embel-embel badan pers, padahal media tersebut adalah media abal-abal," ujar Stanley menceritakan contoh kasus yang pernah ia temui.

Persatuan Kebaikan

Dalam pada itu, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi, mengingatkan media massa, khususnya pers untuk ikut terlibat dalam upaya pencegahan terorisme. Dia menganalogikan keterlibatan pers sebagai sebuah persatuan kebaikan untuk melawan kejahatan.

Hal itu disampaikan Imam Wahyudi saat menjadi pemateri dalam kegiatan Visit Media yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Bali di RRI Denpasar dan TVRI Bali, Rabu (2/8/2017).

"Pers adalah bagian dari elemen masyarakat yang merupakan kebaikan dan harus bersatu, bahu-membahu membantu Pemerintah dalam pencegahan terorisme," kata Imam.

Pria yang menghabiskan karirnya di media massa baik cetak maupun elektronik tersebut juga mengatakan, keterlibatan media menjadi mutlak karena yang dihadapai adalah terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa.

"Tidak bisa kalau hanya Pemerintah yang (diandalkan untuk) menyelesaikan persoalan terorisme. Masyarakat, termasuk pers di dalamnya, juga harus terlibat aktif," tambahnya.

Namun Imam Wahyudi mengingatkan bahwa keterlibatan pers dalam upaya ini tetap harus pada koridornya, yakni dalam kerja-kerja jurnalistik yang profesional dan independen.

"Artinya bekerja sesuai standar profesi yakni menguasai konsep, ilmu pengetahuan baik khusus maupun umum, skill dan etika. Juga selalu siap mempelajari dan menguasai pengetahuan dan hal-hal baru yang diperlukan agar bisa bekerja secara profesinal dan independen," pungkasnya. (***wartakota.tribunnews.com)***

Verifikasi Perusahaan Media Penting

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menekankan pentingnya verifikasi perusahaan media. Hal itu diungkapkannya setelah Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri menangkap tiga orang dari kelompok Saracen, sindikat penyedia jasa konten kebencian.

"Dia kelompok bayaran yang mempunyai sekitar 700 ribu pengikut. Mereka punya *saracennews.com* yang merupakan media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Verifikasi menjadi *urgent* sekarang, untung ada tim siber dari Polri," ujarnya kepada *Tempo*, Kamis (24/8/2017).

Apabila ditinjau secara umum, kata Stanley, berita yang ditampilkan di laman tersebut tampak biasa saja. Hanya saja, dia berujar permasalahan terjadi lantaran kelompok itu juga memproduksi konten *hoax* dan konten kebencian berbau SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan) melalui media sosial.

Menurut dia, sekarang ini oknum berkedok media seperti Saracen cukup banyak. "Marak media-media seperti ini (*saracennews.com*). Ini yang ketahuan karena ada patroli siber dari Kepolisian," ujarnya.

Yosep mengatakan media-media *online* telah membanjiri dunia maya. Menurut dia, saat ini yang tercatat di dewan pers dalam data tahun 2015 adalah 168 media *online*. Tetapi dia memperkirakan jumlah media *online* di Indonesia sekarang telah mencapai angka 43.300 media.

Karena itu, Yosep menyatakan pentingnya verifikasi terhadap media-media tersebut guna mencegah penyalahgunaan media oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "Ini penting karena saat ini banyak pihak tidak punya pegangan media apa saja yang bisa diajak kerja sama dan sehat. Banyak media yang dibuat untuk menghisap APBD, juga menyebarkan fitnah dan *buzzer*," ucapnya.

Dia mengingatkan bahwa semangat dari media adalah kebebasan pers yang bermuara pada kepentingan publik. "Kalau fungsi pers digunakan untuk hal negatif seperti memproduksi isu sara dan disebarkan, maka itu bukan institusi pers. Pers itu melayani publik dan bukan melayani hal-hal negatif seperti itu," dia menegaskan.

Ke depannya, Dewan Pers akan tetap bekerja sama dengan kepolisian untuk membantu proses-proses penindakan kasus yang berkaitan dengan media. Dia menyatakan siap mendatangkan ahli pers bila memang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus itu. ***(tempo.co)***

PELUNCURAN BUKU -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto bertukar plaket dengan Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo pada seminar dan peluncuran buku IKP 2016 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (8/82017).

Foto: Etika/Emi

Dewan Pers Luncurkan IKP 2016

Indonesia di Bawah Timor Leste

Dewan Pers pada Selasa, 8 Agustus 2017 meluncurkan buku hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2016. Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan IKP 2016 memuat survei di 24 kota di Indonesia. Jumlah kota ini lebih banyak dibandingkan IKP tahun 2015 lalu yang melakukan survei di 13 kota.

Berdasarkan IKP 2016, posisi terbaik diraih oleh Kalimantan Barat, sedangkan yang indeks kemerdekaan pers terburuk ada di Papua Barat. Tujuan survei yakni untuk memetakan dan memonitor perkembangan pelaksanaan hak kemerdekaan pers. Selain itu, memberi sumbangan pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik mengenai kemerdekaan pers serta membantu mengidentifikasi prioritas-prioritas apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan ke depan.

Selain memperbaiki situasi kemerdekaan pers antar daerah, Dewan Pers juga berharap semua pihak bisa membantu Indonesia menaikkan posisi di Indeks Kebebasan Pers di dunia. Peringkat IKP Indonesia 2017 berada di urutan 124. Peringkat tersebut naik dibanding tahun lalu yang berada di posisi 150. Anehnya, kebebasan pers Indonesia ternyata masih di bawah Timor Leste.

"Tahun ini, Indonesia menduduki posisi ke-124 dari 150 negara terkait IKP. Jadi kemerdekaan pers Indonesia jauh di bawah Timor Leste, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand," ujar Stanley.

Ia menilai, posisi Indonesia yang berada di bawah Timor Leste tidak masuk akal, karena justru lembaga semacam Dewan Pers di negara tersebut, meminta Dewan Pers di Indonesia menjadi mentor mereka. "Sesuatu yang tidak masuk akal, karena Dewan Pers diminta menjadi mentor untuk Dewan Pers Timor Leste," katanya.

Ia pun menceritakan pengalamannya, ketika melihat secara langsung kondisi pers di Timor Leste, setelah dua kali menyambangi negara tersebut. "Mereka sedang menyusun perangkat-perangkat lunak bagaimana untuk menangani pengaduan Dewan Pers, dan seluruhnya mereka mengadopsi dari model yang dikembangkan Dewan Pers Indonesia," tutur Stanley.

Dia menyebut, jumlah media massa di negara tersebut tidak sebanyak di Indonesia, hanya ada 14. Hal ini sangat jauh dibandingkan media di Indonesia yang mencapai 47.000.

"Dari sisi perusahaan pers di Timor Leste, itu hanya bantuan-bantuan pemerintah kepada media setempat. Industri pers belum tumbuh dengan sehat," kata dia.

Dia menegaskan, dengan melihat kondisi tersebut, posisi pers Indonesia di bawah Timor Leste bukanlah kabar yang menggembirakan. Apalagi di sisi lain, pers Indonesia sudah mengalami perkembangan yang jauh lebih baik setelah Orde Baru.

"Kini orang bebas mendirikan perusahaan pers, wartawan bebas bekerja dan mengkritik. Di beberapa daerah memang masih ada kasus kekerasan terhadap wartawan. Namun, secara umum perkembangan pers Indonesia terus menuju arah lebih baik," pungkas Yosep.

Tahun lalu, dua lembaga internasional yang rutin mengeluarkan

Indeks Kebebasan Pers (IKP) dunia, yakni Reporters Without Borders (RWB) atau Reporters Sans Frontières (RSF), dan Freedom House menempatkan pers Indonesia di peringkat 130, di bawah negara-negara yang sedang mengalami konflik atau perang seperti Afganistan pada peringkat 120 dan Zimbabwe pada peringkat 124. (***rapler.com/ global-news.co.id)***

Kepentingan Pemilik Jadi Tantangan

Tarikan kepentingan pemilik media menjadi salah satu ancaman terbesar kemerdekaan pers di Indonesia. Kegagalan mengatasi tantangan itu dalam jangka panjang akan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pers. Padahal, pada era banjir informasi media sosial, peran pers semakin dibutuhkan untuk menyediakan informasi berbasis fakta yang terverifikasi.

Paparan hasil Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2016 di Indonesia yang disusun oleh Dewan Pers di Jakarta, Selasa (8/8/2017), secara umum menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Indonesia berada dalam kategori agak bebas dengan nilai 63,44. Dari skala 0-100, semakin mendekati 100 semakin baik tingkat kemerdekaan pers. Kategori agak bebas di kisaran nilai 56-69.

Indeks itu disusun berdasarkan 20 indikator yang terbagi dalam tiga dimensi besar, yakni lingkungan fisik dan politik, ekonomi, serta hukum. IKP 2016 yang mengambil sampel 24 provinsi di Indonesia mengindikasikan tantangan terbesar kemerdekaan pers di Indonesia bukan lagi soal intervensi dari penguasa seperti terjadi pada era Orde Baru, tetapi berasal dari internal pers.

Lima indikator utama yang terindikasi mengancam kemerdekaan pers, berdasarkan data IKP 2016, ialah independensi media dari kelompok kepentingan (56,14 persen), tata kelola perusahaan (57,63), independensi lembaga peradilan (59,33), etika pers (69,85), dan kehadiran lembaga penyiaran publik (61,25).

"Kami mendorong institusi pers betul-betul independen. Ruang redaksi dipimpin oleh wartawan senior yang bisa bertahan kalau diintervensi pemilik," kata Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo .

Menurut Stanley, pemilik media bisa berganti dan afiliasi politik pemilik media bisa berganti, tetapi redaksi media relatif tetap berada di institusinya sehingga rentan dijadikan sasaran massa yang tidak suka dengan afiliasi politik pemilik media. Oleh karena itu, Dewan Pers mendorong sertifikasi kompetensi wartawan lalu juga memverifikasi perusahaan media. Jika kemudian media digunakan untuk corong politik berulang-ulang, bisa saja Dewan Pers membatalkan hasil verifikasi media itu.

Dalam pada itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, peran pers semakin besar di tengah banjir informasi akibat pertumbuhan internet.

Menurut dia, media bisa memberikan informasi yang valid agar informasi yang diterima masyarakat melalui internet tidak langsung diterima begitu saja. Ia mengharapkan media-media arus utama *(mainstream)* menjadi salah satu ujung tombak dalam melawan *hoax* atau berita palsu melalui pemberitaan sesuai dengan fakta.

Menurut dia, saat ini media "*mainstream*" kembali dicari oleh masyarakat sebagai sumber informasi yang lebih dipercaya setelah banyaknya informasi yang ada di media sosial. Untuk itu, berbagai pemberitaan di media "*mainstream*" juga diharapkan ikut disebarkan melalui media sosial.

Menurut dia, saat ini, masyarakat Indonesia memiliki perilaku untuk menyebarkan informasi yang dominan dengan pola 10-90. "Artinya 10 persen memproduksi informasi dan 90 persen lainnya yang menyebarkan," katanya.

Dengan adanya berbagai informasi yang terpercaya dari media-media "*mainstream*" maka diharapkan juga persepsi masyarakat yang terbentuk juga lebih baik, hal ini mengingat informasi yang dibuat oleh media massa melalui prinsip kerja jurnalistik yang mengendepankan fakta.

Di sisi lain, media sosial yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyebarkan informasi tidak memiliki prinsip kerja jurnalistik sehingga informasi apapun dapat disebarkan meskipun tidak benar.

"Kalau media memenuhi dengan info yang valid , berita betul-betul akurat, maka akan lebih sehat dan berimbang," katanya. ***(Kompas/ Antara)***

Berita Palsu dan Disiplin Verifikasi

Oleh: Nezar Patria

MESKIPUN berita palsu (*fake-news*) dan juga *hoax* bukan tema baru dalam sejarah peradaban manusia, tapi persoalan besar di Abad 21 ini adalah kebohongan menyebar lewat teknologi media telah dikemas menyerupai fakta sesungguhnya. Bukan hanya teks, berita palsu kini disajikan secara audio visual dan menampilkan "kebenaran" dengan mengecoh persepsi, menipu indera, dan juga memelintir logika.

Tentu ini adalah perkara serius. Berita bohong telah dipakai untuk menggosok emosi, sentimen politik atau agama, yang lalu diterima tanpa kritik sebagai sebuah kebenaran oleh sekelompok orang. Dalam skala tertentu berita palsu sengaja diproduksi guna memperparah ujaran kebencian, memicu konflik sosial dan bahkan perang. Gejala ini, dan ihwal berita palsu menyebar dengan begitu meyakinkan, dikenal sebagai gejala "*Post-Truth*".

Video Donald Trump menyerukan perang terhadap Korea Utara, atau foto tentang pembantaian Muslim Rohingya oleh pendeta Budha di Myanmar misalnya. Meskipun ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara, tapi Trump tampaknya belumlah segila itu membangkit kengerian orang akan perang nuklir yang bakal membuat seisi bumi pralaya. Atau ketegangan memburuk antara Muslim dan Budhis di Myanmar, tak serta merta berujung kepada pembantaian sesadis digemborkan foto palsu itu.

Ada karakter khas dari *fake-news:* Ia selalu menumpang pada fakta dari peristiwa yang melingkupinya. Distorsi atas fakta itu lalu membangun persepsi, seolah-olah memang ada peristiwa sesungguhnya, dan dikemas melalui olahan teknologi canggih. Rekayasa tak sebatas foto yang kini terasa ketinggalan dan kurang nancep bohongnya, namun lebih dahsyat lagi memakai manipulasi audio visual.

Seperti dilaporkan *The Guardian* akhir Juli lalu, teknologi terbaru dari aplikasi *Face2Face* yang dikembangkan oleh Universitas Stanford, gudangnya inovasi digital bagi industri di Silicon Valley, nyaris sempurna memanipulasi video pidato seorang tokoh dengan mengikuti gerak mulut dan suara si orang kedua. Lebih canggih lagi dua tahun lalu dilaporkan periset di Universitas Alabama di Birmingham, mampu melakukan impersonasi audio alias kloning suara seseorang hanya dalam hitungan menit.

Ketepatan vibrasi pita suara tiruan itu sangat mencengangkan. Dengan temuan itu, mereka dapat mengecoh suara biometrik seseorang untuk menjebol sistem keamanan digital tertentu, misalnya transaksi bank dan telepon seluler. Bisa dibayangkan bagaimana *fake-news* akan semakin digdaya dengan memadukan semua teknologi digital ini, bahkan dengan bantuan kecerdasan buatan, melakukan manipulasi fakta sampai batas yang belum pernah kita bayangkan.

Korban pertama kecanggihan manipulasi fakta ini tentu saja jurnalisme. Tugas inti jurnalisme, begitulah yang didengungkan oleh kode etik jurnalistik universal, adalah melaporkan fakta secara jujur dan penuh, tidak bohong dan setengah hati. Dengan merebaknya kemampuan *fake-news* hadir menyerupai fakta sebenarnya (factoid), apakah yang tersisa bagi kebenaran jurnalisme?

Tantangan terbesar jurnalisme kontemporer adalah bagaimana ia membersihkan kembali fakta dari selubung teknologi manipulatif. Namun di sisi lain, teknologi komunikasi telah memaksa kita merenungkan kembali pengertian tentang fakta dan juga kebenaran. Misalnya, jika fakta kita artikan sebagai sesuatu yang ada (*das Sein*) dan hadir secara alamiah, otentik, dan bebas dari interpretasi, maka memahaminya dalam lingkup era "*Post-Truth*" mungkin menjadi tugas besar, sesuatu yang melampaui jurnalisme, dan mungkin masuk ke filsafat.

Tugas jurnalisme makin berat, karena kebenaran jurnalistik tampaknya kini tidak boleh berhenti pada lapis fakta permukaan, namun harus menggalinya lebih dalam. Ada pelajaran dari tayangan National Geographic beberapa waktu lalu, sebuah dokumenter yang menarik tentang ditemukannya DNA rusa dari

bulu hewan yang menabrak badan sebuah pesawat militer di Florida, Amerika Serikat. Pilot mengkonfirmasi bahwa tak ada rusa di landasan, dan dia tak menabrak benda apapun di darat. Bukti ilmiah lainnya menunjukkan tabrakan terjadi di ketinggian.

Jika jurnalisme berhenti pada fakta itu, bisa diperkirakan pertanyaan apa yang bakal merebak: benarkah ada rusa yang bisa terbang? Ia juga menggiring kepada banyak interpretasi yang non-ilmiah, semacam imajinasi apakah pesawat itu telah menabrak kereta rusa Sinterklas yang melintas di angkasa pada hari itu? Anda bisa bayangkan sendiri fakta ini diolah oleh fake-news, dan bagaimana dia menjadi viral dan mengguncangkan bagi publik awam.

Bahkan kebenaran yang mengacu pada Teori Kebenaran neo-klasik atau dikenal dengan Teori Korespondensi barangkali akan mengamini kebenaran berita itu. Bahwa memang benar ada rusa terbang, jika kebenaran menurut teori itu diartikan sebagai kesesuaian antara proposisi (ada rusa terbang di langit) dan fakta (DNA rusa). Kita tidak sedang memperdebatkan teori kebenaran secara filsafat, karena tema apakah kebenaran telah melahirkan begitu banyak teori dan aliran pemikiran. Tapi apa yang kira-kira bisa diselesaikan oleh jurnalisme dalam perkara ini?

" Kebenaran jurnalistik tak bisa berhenti pada satu lapisan fakta saja. Lapis pertama bisa menipu dan menyesatkan, namun lapisan kedua, di mana fakta-fakta otentik digali lebih detil, akan menyibak kebenaran lainnya. Dibutuhkan pemikiran kritis (critical thinking) selain kemampuan verifikasi "

Jurnalisme, suka tak suka, haruslah kembali kepada disiplin verifikasi, seperti yang dilakukan oleh sains dalam kasus bulu rusa di badan pesawat militer. Sejumlah ahli burung dikerahkan, dan mereka menelisik kembali dengan hati-hati: semua data diuji ulang, hingga akhirnya ditemukan bulu itu adalah sisa isi perut burung pemakan bangkai. Data biologis burung itu menunjukkan kemampuan melayang setinggi lintasan pesawat terbang. Bukti lain menunjukkan burung itu menyantap bangkai rusa sebelum ia terbang tinggi dan tamat dihajar pesawat militer.

Dengan demikian, kebenaran jurnalistik tak bisa berhenti pada satu lapisan fakta saja. Lapis pertama bisa menipu dan menyesatkan, namun lapisan kedua, di mana fakta-fakta otentik digali lebih detil, akan menyibak kebenaran lainnya. Dibutuhkan pemikiran kritis (*critical thinking*) selain kemampuan verifikasi. Itu sebabnya, jurnalisme terutama bagi media serius yang hidup dan menjadi pemeluk teguh jurnalisme bermutu, berusaha keras mengembalikan inti atau ruh jurnalisme di tengah gemuruh produksi informasi dari media sosial.

Dalam soal inilah pertumbuhan media online menjadi penting disimak. Selama satu dekade ini kita menyaksikan munculnya jurnalisme online yang menggeser jurnalisme tradisional, terutama media cetak dan juga penyiaran. Meledaknya penggunaan telepon pintar, kian mudahnya koneksi internet di segala penjuru bumi, telah mengakibatkan milyaran informasi beredar setiap harinya melalui media sosial. Jika setengah informasi yang beredar adalah berupa berita palsu atau data yang menyesatkan, apakah yang

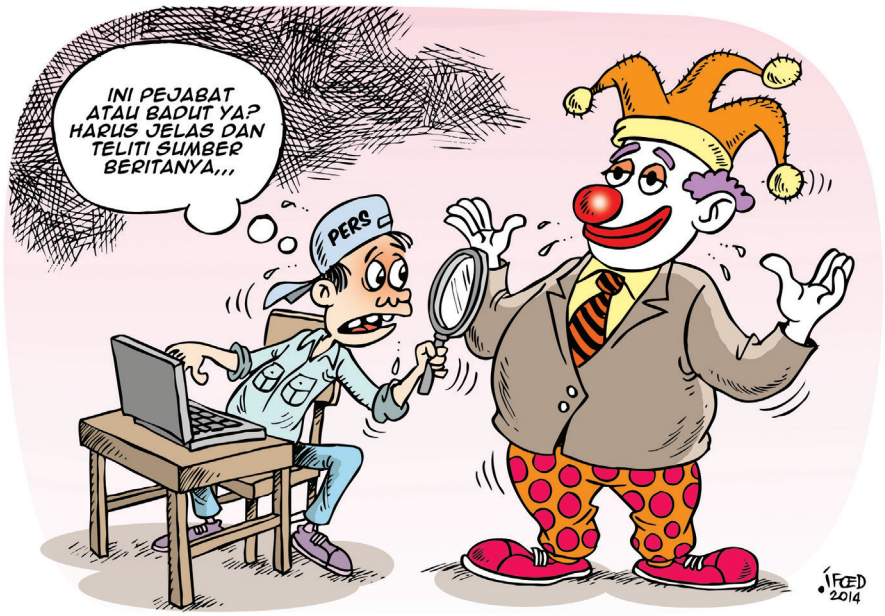

terjadi pada kehidupan manusia?

Kecemasan ini bukan hal mengada-ada. Dampak *fake-news* kepada keputusan publik telah dirasakan di Amerika Serikat dan Inggris, yang membuat Trump menang dan warga Inggris dianggap bodoh dengan memilih Brexit, sehingga negeri itu kian kelimpungan secara ekonomi. Dalam soal ini, tampaknya fake-news yang berisi ujaran kebencian, sangat efektif menggosok emosi dan bukan mempertajam akal budi.

Bahwa munculnya narasi sarat distorsi fakta, dengan tujuan politik tertentu, bukanlah soal baru. Betapa mudah orang terbakar oleh isu, menurut George Lakoff dalam karyanya The Political Mind, yang menjadi kitab para juru kampanye politik abad digital, karena orang lebih banyak terpengaruh bertindak dengan sesuatu yang 'refleksif', dan bukan oleh narasi reflektif.

Refleksif mengacu kepada rangsangan emosional yang bisa memunculkan keputusan spontan, misalnya kisah kebesaran Amerika Serikat, dan mengapa orang Amerika harus bangkit mencegah sesuatu yang 'non-Amerika' berkuasa di negeri itu. Hal itu lebih efektif ketimbang paparan program partai yang membutuhkan waktu untuk mencerna, sebagai sebuah sikap reflektif.

Dengan demikian tentu saja jurnalisme mendapat beban lebih berat. Bahwa ia bukan saja bertanggungjawab atas kebenaran fakta, tapi juga menarik orang untuk menyimaknya melawan berita palsu yang menyebar di media sosial. Sejumlah media sosial mulai menyadari kekeliruan karena membiarkan platformnya dipakai untuk penyebaran ujaran kebencian melalui *fake-news*. *Facebook* membuat program Journalism Project untuk memperkuat posisi media jurnalistik melawan berita palsu, demikian juga *Google*.

Organisasi media di Eropa dan Amerika Serikat bersekutu mendukung situs pengecek fakta semacam *firstdraftnews.com* dan *factcheck.org*, namun upaya itu masih harus terus diperkuat mengingat sedikit pengunjung datang melongok ketimbang mereka yang mengunyah berita palsu.

Satu-satunya harapan bagi jurnalisme online adalah kembali menajamkan apa yang menjadi senjatanya: disiplin verifikasi. Dan tentu dengannya ia menjadi modal penting menghidupkan kembali semangat investigatif membongkar serangan gencar aneka berita palsu. ***

Nezar Patria
adalah Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Dewan Pers.

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- **Ketua:** Yosep Adi Prasetyo
- **Wakil Ketua:** Ahmad Djauhar
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Yosep Adi Prasetyo
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto)

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

*(**ETIKA** dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)*

Kredibilitas Media dan Reputasi Bangsa

Oleh: Bagir Manan

BAGIAN3

Bung Hatta menjawab. Jabatan Presiden itu berat sekali (Presiden memegang kekuasaan pemerintahan: Pen), karena itu tidak akan ada orang yang akan terus menerus menjadi Presiden. Jadi, diharapkan, praktek ketatanegaraan akan melahirkan pembatasan. Tentu saja, kalau demokrasi berjalan dengan baik, atau ada kemungkinan terjadi perubahan perimbangan kekuasaan politik sehingga MPR (pada waktu itu) akan memilih orang baru. Praktek yang kita alami (das Sein) tidak seperti pemikiran Bung Hatta (das Sollen). Hal ini terjadi karena yang berkuasa terkena penyakit sebagai penikmat kekuasaan, tidak ada keinsyafan bahwa sistem yang kita pilih menghendaki pembatasan.

Berbeda dengan Amerika Serikat (sebelum Amandemen XXII, 1951). UUD Amerika Serikat (sebelum perubahan) menyebutkan: "*He shall hold his office during the term of four years, and together with the Vice-President, chosen for the same term…"*). Hanya menyebut "4 tahun" tidak ada ketentuan "dapat atau tidak dapat dipilih kembali". Presiden pertama, George Washington telah menjabat *dua kali berturut-turut*. Ketika diminta untuk dipilih kembali, beliau menolak. Alasannya: Amerika Serikat memilih bentuk republik bukan kerajaan.

Kepala negara republik ada pembatasan masa jabatan, berbeda dengan kerajaan yang tanpa batas waktu. Sikap Presiden Washington, menjadi praktek, sampai "terlanggar" pada masa pemerintahan Presiden Roosevelt (dipilih 4 kali berturut-turut) yang kemudian mendorong Amandemen Ke-XXII yang membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali berturut-turut. Demikian pula di Indonesia (Perubahan UUD 1945, Pasal 7, 1999). Jadi, kehadiran Presiden baru di negeri kita merupakan konsekuensi ketentuan UUD dan merupakan satu kelaziman republik-demokratis.

Pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden, atau melalui *electoral college* (meskipun dalam perkembangan menjadi sekedar the dummy dari popular vote), menimbulkan resiko perbedaan kekuatan politik pendukung Presiden-Wakil Presiden dengan mayoritas kekuatan politik di badan perwakilan rakyat. Perbedaan ini sangat berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan kebijakan (program) Presiden. Presiden Obama (juga Presiden Clinton) menghadapi persoalan yang sama. Hal semacam itu sedang terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat perbedaan itu tercermin dalam perbedaan pendekatan mengenai kebijakan yang harus ditempuh. Di Indonesia, mayoritas (yang berbeda dengan Presiden) sekedar dijadikan "pembenaran" untuk menguasai semua jabatan di luar jabatan Presiden-Wakil Presiden dan Menteri. Sampai-sampai ada ungkapan: sapu bersih dan sikap untuk menghalangi agar Presiden-Wakil Presiden tidak berhasil menjalankan pemerintahannya. Kalau sikap itu berlanjut, dapatlah disimpulkan, peradaban politik cq peradaban demokrasi yang kita jalankan, masih jauh dari budaya politik (demokrasi) yang berkeadaban. Mudah-mudahan sikap semacam itu sekedar "kemarahan sementara", dan akan kembali pada prinsip demokrasi yang lebih substantif yaitu dialog, toleransi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.

Satu-satunya cara melonggarkan politik pengepungan itu, (kalau berkelanjutan) yaitu dengan cara

"Media tidak semestinya melibatkan diri pada persoalan-persoalan yang tidak semestinya dipersoalkan lagi, seperti mengembalikan pemilihan Presiden-Wakil Presiden oleh MPR, bukan langsung oleh rakyat".

berusaha mendapatkan dukungan rakyat banyak. Hal ini dapat tercapai apabila pemimpin baru (Presiden-Wakil Presiden) mengembangkan orientasi serba kerakyatan, terutama dalam makna usaha mewujudkan secara nyata kesejahteraan dan kemakmuran. Pada akhirnya, kekuatan-kekuatan politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan akan ditinggalkan rakyat. Dari perspektif rakyat, inilah makna riil "mengisi kemerdekaan". Menanamkan semangat kebangsaan, menanamkan semangat kepribadian, menanamkan semangat berdikari penting, tetapi seperti dikatakan Nehru, rakyat sejahtera, kalau cukup sandang, pangan, rumah, jaminan pendidikan dan kesehatan. Hegel mengatakan, manusia butuh makan, sandang, rumah sebelum mereka dapat berpolitik bahkan beragama. Di sinilah peran media menjadi sangat penting sebagai penunjang program-program kerakyatan. Media tidak semestinya melibatkan diri pada persoalan-persoalan yang tidak semestinya dipersoalkan lagi, seperti mengembalikan pemilihan Presiden-Wakil Presiden oleh MPR, bukan langsung oleh rakyat. Harus dipahami, gagasan semacam itu bertentangan dengan konsep dasar demokrasi dan konsep *democratizing process* perjalanan politik bangsa, dan kehendak publik.***

Banyak Wartawan Belum Uji Kompetensi

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, H Margiono memperkirakan, saat ini banyak wartawan belum mengikuti uji kompetensi.

"Saat ini ada sekitar 100.000 hingga 150.000 wartawan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 20.000 yang mengantongi sertifikat kompetensi, sisanya wartawan alam," kata mantan Wakil Ketua Dewan Pers itu saat menghadiri pelantikan pengurus PWI Provinsi Kalteng yang diketuai H Sutransyah di Palangka Raya, Jumat (22/8/2017).

Margiono menyebut masih banyak wartawan yang belajar secara otodidak atau melalui seleksi alam. Jangan heran jika masih banyak pula wartawan yang tidak mengerti tentang kode etik jurnalistik dan rambu-rambu tentang profesi wartawan.

Dia tidak menampik fakta bahwa saat ini banyak wartawan yang kualitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Padahal selama ini masyarakat umum sering menganggap bahwa wartawan identik dengan PWI.

"Makanya kita juga bertanggung jawab untuk membantu mereka mengikuti pendidikan agar bisa menjadi profesional. Wartawan itu minimal sering membaca kode etik jurnalistik jadi tahu tentang rambu-rambunya," kata Margiono. (antaranews.com)

Foto: Etika/Chelsia

TINJAU TELEVISI -- Delegasi Dewan Pers Indonesia melihat perkembangan Mahachai Cable TV Ltd di Provinsi Samut Sakhon Thailand. Foto mnunjukkan, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi yang juga Direktur Eksekutif Asosiasi TV Lokal Indonesia, saling bertukar plaket dengan Direktur Mahachai Cable TV Ltd Weerapong Limthanasran, Jumat (18/8/2017).

Dewan Pers Kunjungi Thailand

Dewan Pers Indonesia dari tanggal 16-19 Agustus 2017 berkunjung ke Thailand, menemui rekan-rekannya, Dewan Pers Thailand (the National Press Council of Thailand). Delegasi Dewan Pers Indonesia terdiri dari Nezar Patria (Ketua delegasi), Imam Wahyudi, Jimmy Silalahi, Ratna Komala dan anggota Kelompok Kerja Dewan Pers, Christiana Chelsia.

Dewan Pers Thailand dan Dewan Pers Indonesia telah menjalin hubungan yang erat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Thailand, Chavarong Limpattamapannee dan Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia, Ketua Dewan Pers Thailand dan Ahmad Djauhar, pada 24 Mei 2016 di Jakarta.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar didampingi anggota Dewan Pers, Hendry CH Bangun, telah berkunjung ke Thailand pada 3 Juli 2017. Ahmad Djauhar diundang menjadi pembicara bersama wakil Dewan Pers Australia, Press Ombudsman Swedia dan Dewan Pers Myanmar pada acara konferensi internasional peringatan 20 tahun Dewan Pers Thailand dengan tema "*International Experiences in Media Self-Regulation*".

Topik Swaregulasi

Dalam kunjungannya ke Thailand tersebut, rombongan Dewan Pers Indonesia yang dipimpin Ketua Komisi Hubungan Internasional Dewan Pers itu diterima Ketua Komisi Hubungan Internasional Dewan Pers Thailand didampingi oleh Ketua Dewan Pers Thailand, Chavarong Limpattamapanee.

Rombongan kemudian berdialog dan berdiskusi dengan Dato Anusart Suwanmongkol dan Khunying Sumonta Promboon, keduanya anggota Dewan Legislatif Kerajaan Thailand (the National Legislative Assembly, the Kingdom of Thailand). Kedua mitra ini terlibat dialog dan diskusi intens terkait dengan sistim swaregulasi yang berlaku di Dewan Pers Indonesia, serta penerapan UU No.40/1999 tentang Pers.

Selain itu, Dewan Pers Indonesia juga menjelaskan seputar mekanisme pengaduan masyarakat ke Dewan Pers di Indonesia melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi, serta melalui mediasi dan adjudikasi.

Kepada tamunya, kedua tokoh Thailand itu mengemukakan bahwa Pemerintah Thailand kini tengah berusaha membuat undang-undang tentang pers. Untuk itu Dewan Pers Thailand memandang perlu mendengar secara langsung penjelasan dan pengalaman praktis Dewan Pers Indonesia yang mampu menjamin kemerdekaan pers di tengah lapisan masyarakat yang beragam suku dan bahasanya.

Selain mengadakan dialog dan diskusi, rombongan Dewan Pers Indonesia juga menyempatkan berkunjung ke Mahachai Cable TV Ltd di Provinsi Samut Sakhon.

Direktur TV itu menjelaskan, meski berstatus ijin sebagai cable tv, Mahachai juga memproduksi konten lokal dari wilayah propinsi terkait, terutama berkaitan dengan pemberitaan.

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi yang juga Direktur Eksekutif Asosiasi TV Lokal Indonesia, melakukan dialog lebih khusus upaya membuka kerjasama untuk sharing konten lokal dari TV Lokal di Indonesia kepada Mahachai Cable Digital TV Ltd. ***(C-3)***

Koran Tempo dan Kompas Tak Langgar Kode Etik

Foto: Etika/Retno

MEDIASI – Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar (tengah) bersama Djazuli (kiri), mewakili Sekretariat Jenderal DPR RI (Pengadu) dan Budiman Tanuredjo, Pemred Kompas (Teradu), berfoto seusai mediasi di Dewan Pers, Rabu (30/8/2017) .

Berita *Koran Tempo* berjudul "Terdakwa Akui Diminta Setya Berbohong" (edisi 17 April 2017); tweet dari Pemred *Koran Tempo*, Budi Setyarso, berbunyi "Satu hari, dua peristiwa besar, dua berita utama. Bisa berkaitan, bs jg tidak. Itulah arti bolak-balik. #Koran Tempo" (tweet diunggah 12 April 2017); "Dua Terdakwa Konsisten Sebut Setyo Novanto Terlibat Suap E-KTP", dinilai Dewan Pers tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Pernilaian tersebut berdasarkan sidang mediasi dan ajudikasi terhadap pengaduan Erwin Ricardo Silalahi, Ketua Harian Depinas SOKSI, selaku Pengadu terhadap sejumlah berita *Koran Tempo* tersebut, beberapa waktu sebelumnya. Sidang itu dipimpin Wakil Ketua Komisi Pengaduan, Hendry Ch Bangun, dihadiri Pengadu maupun Teradu, di Sekretarat Dewan Pers, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Meskipun demikian, *Koran Tempo* sebagai Teradu memahami perlunya hubungan baik ke depan dengan Pengadu, sehingga bersedia untuk mewawancarai Depinas SOKSI.

Hal serupa juga terjadi pada Harian *Kompas* yang diadukan Setjen DPR yang ditandatangani Sekjen Achmad Djuned. Dalam aduannya tertanggal 10 Juli 2017, Mahkamah Kehormatan Dewan menilai berita *Kompas* berjudul "DPR Terus Mencari Kelemahan KPK" (edisi 4 Juli 2017) dan Tajuk Rencana berjudul "Bukan Perwakilan Koruptor" (edisi 5 Juli 2017) telah menghalangi atau menghina tugas, fungsi dan kewenangan DPR. Namun Dewan Pers dalam sidang mediasi dan ajudikasi yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar dan dihadiri Pengadu dan Teradu pada Rabu (30/8/2017) berkesimpulan *Kompas* tidak melanggar KEJ.

Hal itu berbeda dengan media siber *infonawacita.com* dan *viva.co.id* yang diadukan Edo Agustian Nasution melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Edo dalam pengaduannya tanggal 16 Juni 2017, menyatakan berita *infonawacita.com* berjudul "Diduga Konsumsi Narkoba di Pesawat, 2 Penumpang Diamankan di Bandara Kualanamu (diunggah 2 Juni 2017) yang ternyata diambil dari *tribratanews.com* dan berita *vivaness.co.id* berjudul "Konsumsi Narkoba Dua Penumpang Batik Air Ditangkap Petugas" (diunggah 2 Juni 2017) tanpa konfirmasi kepada Pengadu.

Dewan Pers menyimpulkan berita kedua media tersebut melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak uji infomasi, tidak berimbang dan menghakimi. Kedua media wajib melayani hak jawab dan meminta maaf kepada Pengadu dan masyarakat. ***(Red)***